

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan suatu keadaan, sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan diberbagai keadaan hidup. Sebagian orang memahami istilah kemiskinan secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang mapan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup gambaran kekurangan materi, gambaran tentang kebutuhan sosial, dan gambaran tentang kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai (Soebagiyo,2015).

Menurut BPS dalam Kuncoro (2014) kemiskinan dikonseptualisasikan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang ada dibawah batas kelayakan hidup yang disebut batas garis kemiskinan, yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan. Dengan demikian, garis kemiskinan terdiri dari 2 komponen, yaitu garis kemiskinan makanan (*food line*) dan garis kemiskinan nonmakanan (*nonfood line*).

Kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu: pertama, kemiskinan absolut, dimana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kemiskinan secara

absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Kemiskinan relatif ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencapai standar kehidupan yang ditetapkan masyarakat setempat. Dengan masalah distribusi pendapatan (Kuncoro, 2010).

Kemiskinan mempunyai bermacam-macam aspek. Aspek-aspek ini berbeda-beda tingkatannya dalam tiap-tiap negara. Kemiskinan dalam antrian manusia adalah sedikit makan dan pakaian. Baldwin dan Meier mengemukakan 6 sifat ekonomis yang terdapat di negara-negara miskin atau sedang berkembang yaitu: negara tersebut merupakan produsen barang-barang primer (produksi dari sektor pertanian), menghadapi masalah tekanan penduduk, sumber-sumber alam belum diolah, penduduknya masih terbelakang dari segi ekonomi, kekurangan kapital dan orientasi perdagangan ke luar negeri (Irawan dan Suparmoko, 1992).

Dalam pelaksanaan pembangunan, pertumbuhan yang tinggi merupakan sasaran utama bagi negara berkembang. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi selama periode tertentu tidak lepas dari perkembangan masing-masing sektor dan subsektor yang ikut membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah.

Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai subsistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna otonom, provinsi mempunyai kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepentingan

masyarakat dan mencakupi kesejahteraan masyarakat. Masing-masing provinsi di Indonesia, termasuk provinsi Jawa Tengah harus mampu mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memenuhi target perencanaan ekonomi serta mampu mengatasi permasalahan pembangunan yang terjadi terutama dalam era otonomi daerah dimana masing-masing daerah memiliki kebebasan seluas-luasnya untuk mengelola kekayaan daerah yang dimiliki dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut (Novianto dan Atmanti, 2013).

Berkaitan dengan pembangunan ekonomi daerah, proses lajunya pertumbuhan perekonomian suatu daerah ditunjukkan dengan tingkat penambahan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). Menurut Sukirno dalam Prishardayo (2008) tingkat penambahan PDRB tersebut seringkali dijadikan sebagai ukuran kesuksesan suatu daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam menciptakan pembangunan ekonomi. Secara makro pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah yang dapat dikategorikan dalam Sembilan sektor ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun pertumbuhan ekonomi yang bagus pun menjadi tidak akan berarti lagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwawati, 2009).

**Tabel I-1**  
**Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah**  
**Tahun 2011 -2015**

Tahun	Jumlah penduduk miskin	
	Jiwa (juta )	Presentase
(1)	(2)	(3)
2011	5.317.758	16,20%
2012	4.952.521	14,98%
2013	4.811.981	14,44%
2014	4.562.879	13,58%
2015	4.506.772	13,32%

Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2015

Berdasarkan Tabel 1-1 dapat diketahui bahwa tingkat penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun 2011 hingga 2015 pada tahun 2011 sebesar 16,20%; berhasil turun pada tahun 2012 menjadi 14,98%; tahun 2013 turun 14,44%; tahun 2014 turun 13,58% dan tahun 2015 turun 13,32%. Perkembangan kondisi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah sebenarnya telah mengalami penurunan dari tahun ke tahun . Upaya penanggulangan kemiskinan di provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari berbagai usaha untuk meningkatkan pendapatan, tingkat kesehatan, tingkat pendidikan, dan tingkat lapangan pekerjaan (BPS Jateng, 2015).

Pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk mengentaskan kemiskinan tetapi biasanya pertumbuhan ekonomi merupakan sesuatu yang dibutuhkan, walaupun begitu pertumbuhan ekonomi yang bagus menjadi tindakan berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati; 2009).

Inflasi merupakan suatu keadaan dimana terjadinya kenaikan harga secara signifikan dan terus menerus. Nilai inflasi yang tinggi dapat disebabkan karena

tingginya permintaan suatu barang. Sesuai dengan hukum permintaan, jika permintaan naik maka harga akan ikut naik. Jika permintaan harga barang naik, maka produsen akan berlomba-lomba akan menaikkan jumlah produksinya dengan jalan menambah jumlah tenaga kerja. Penambahan jumlah tenaga kerja ini akan mempengaruhi tingkat pengangguran (Boediono: 1998).

Akar permasalahan kemiskinan kaitannya dengan jumlah penduduk yang tinggi adalah keberadaan lapangan pekerjaan yang tidak bisa menampung kebutuhan angkatan kerja yang tercipta tersebut, sehingga terciptalah pengangguran yang berujung terhadap pembentukan kemiskinan. Pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tetapi belum memperolehnya (Sukirno, 2004).

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk menganalisis masalah kemiskinan dalam skripsi yang berjudul **“Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk, Inflasi, dan Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017.”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan gambaran latar belakang di atas, maka permasalahan pokok yang akan dilihat dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?

2. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?
3. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?
4. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?
2. Menganalisis Bagaimana pengaruh jumlah penduduk ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?
3. Menganalisis Bagaimana pengaruh inflasi terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?
4. Menganalisis Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2002-2017?

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan kebijakan terutama dalam hal kemiskinan.
2. Bagi Bappeda dan BPS sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan.
3. Sebagai referensi penelitian yang akan datang yang berkaitan dengan kemiskinan.

## **E. Metode Penelitian**

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari penelitian sebelumnya baik dari perpustakaan, laporan penelitian terdahulu yang dipublikasikan, jurnal dan lembaga terkait yaitu Badan pusat Statistik. Penelitian ini menggunakan data *time series* wilayah Indonesia dari tahun 2002-2017 dengan menggunakan metode *Ordinary Lest Square* (OLS).

## **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode analisis data dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II Landasan Teori**

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan kemiskinan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, penelitian terdahulu, serta hipotesis.

### **BAB III Metodologi Penelitian**

Bab ini menjelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data penelitian, definisi variabel, dan metode analisis data.

### **BAB IV Analisis Data dan Pembahasan**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi data kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, pembahasan dan hasil penelitian yang meliputi variabel yang berpengaruh terhadap kemiskinan dan interpretasi hasil.

**BAB V Penutup**

Bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

**DAFTAR PUSTAKA****LAMPIRAN**